

Post Modern Educational Management: Dekonstruksi Sistem Pendidikan Konvensional menuju Institusi Adaptif

Darmawati¹, Said Maskur², Muhammad Faisal³

STAI Ibnu Sina Batam¹, IAI Ar-Risalah Inhil², STAIN Sultan Abrurrahman Kepri³

Email Korespondensi: darmaammam@gmail.com, said.maskur@gmail.com, faisal@stainkepri.ac.id

Article received: 10 April 2026, Review process: 12 Mei 2026,

Article Accepted: 22 Juni 2026, Article published: 01 Juli 2026

ABSTRACT

The conventional educational system, characterized by hierarchical, bureaucratic, and standardized structures, faces a crisis of relevance in the postmodern era marked by plurality, fluidity, and uncertainty. This article analyzes the deconstruction of the conventional educational system toward adaptive institutions through the perspective of post modern educational management using a qualitative-descriptive approach with a five-dimensional analytical framework encompassing ontological, epistemological, axiological, methodological-strategic, and teleological-transformative dimensions. Through a four-phase transformation process comprising conventional deconstruction, managerial epistemological reconstruction, institutional adaptation, and adaptive resilience, this study maps the trajectory of change from the modernist paradigm to the postmodern paradigm in educational management. Case studies of SMA Cendekia Harapan Tangerang, SMK Telkom Malang, and SD Islam Al-Izzah Batu reveal diverse yet complementary adaptation models. Critical analysis identifies four primary risks including managerial relativism, institutional disintegration, bureaucratic resistance, and organizational anomie, which threaten the sustainability of such transformation. Findings demonstrate that deconstruction toward adaptive institutions requires synergy between adaptive leadership rooted in the principles of continuous learning and flexible organizational design, where postmodernity is not responded to as a threat but as an opportunity for institutional renewal that maintains a balance between stability and change.

Keywords: Post Modern Educational Management, Deconstruction, Adaptive Institution, Adaptive Leadership, Adaptive Resilience

ABSTRAK

Sistem pendidikan konvensional yang bersifat hirarkis, birokratis, dan terstandarisasi menghadapi krisis relevansi di era postmodern yang ditandai oleh pluralitas, fluiditas, dan ketidakpastian. Artikel ini menganalisis dekonstruksi sistem pendidikan konvensional menuju institusi adaptif melalui perspektif post modern educational management dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan kerangka analisis lima dimensi, yakni ontologis, epistemologis, aksiologis, metodologis-strategis, dan teleologis-transformatif. Melalui proses empat fase transformasi, yaitu dekonstruksi konvensional, rekonstruksi epistemologi manajerial, adaptasi institusional, dan resiliensi adaptif, penelitian ini memetakan trajektori perubahan dari paradigma modernis menuju paradigma postmodern dalam manajemen pendidikan. Studi kasus terhadap SMA Cendekia Harapan Tangerang, SMK Telkom Malang, dan SD Islam Al-Izzah Batu mengungkap model adaptasi yang beragam namun

saling melengkapi. Analisis kritis mengidentifikasi empat risiko utama, meliputi relativisme manajerial, disintegrasi institusional, resistensi birokratis, dan anomie organisasional, yang mengancam keberlangsungan transformasi tersebut. Temuan menunjukkan bahwa dekonstruksi menuju institusi adaptif memerlukan sinergi antara kepemimpinan adaptif yang berakar pada prinsip pembelajaran berkelanjutan dan desain organisasi yang fleksibel, di mana postmodern bukan direspons sebagai ancaman melainkan sebagai peluang pembaruan institusional yang mempertahankan keseimbangan antara stabilitas dan perubahan.

Kata Kunci: *Post Modern Educational Management, Dekonstruksi, Institusi Adaptif, Kepemimpinan Adaptif, Resiliensi Adaptif*

PENDAHULUAN

Sistem pendidikan konvensional yang selama ini menjadi fondasi penyelenggaraan pendidikan di seluruh dunia dibangun di atas asumsi-asumsi modernis yang menekankan rasionalitas, efisiensi, standardisasi, dan kontrol birokratis. English (2003) mendokumentasikan bahwa teori dan praktik administrasi pendidikan telah lama didominasi oleh paradigma modernis yang mengandaikan organisasi pendidikan sebagai mesin yang dapat dikendalikan melalui hierarki keputusan, spesialisasi tugas, dan pengukuran kinerja yang terstandarisasi. Bush (2020) menegaskan bahwa model manajemen pendidikan konvensional bersifat top-down, menghasilkan organisasi yang kaku dan tidak responsif terhadap perubahan. Paradigma ini kini menghadapi krisis fundamental yang menuntut reevaluasi menyeluruh.

Era postmodern yang ditandai oleh runtuhnya meta-narasi, pluralitas perspektif, dan fluiditas identitas menghadirkan tantangan yang tidak dapat diatasi oleh model manajemen pendidikan konvensional. Hargreaves (1994) mengidentifikasi bahwa restrukturisasi pendidikan di era postmodern menghadapi paradoks di mana upaya perubahan yang dilakukan dalam kerangka modernis justru mereproduksi struktur yang hendak diubah. Furman (1998) menambahkan bahwa postmodernisme menghadirkan paradoks antara tuntutan desentralisasi dan kecenderungan kontrol terpusat. Kilicoglu dan Kilicoglu (2020) mengembangkan perspektif metamodern yang menawarkan sintesis antara modernitas dan postmodernitas, mengandaikan bahwa institusi adaptif memerlukan kemampuan beroperasi dalam tensi kedua paradigma secara produktif.

Permasalahan mendasar yang mengemuka adalah bagaimana melakukan dekonstruksi sistem pendidikan konvensional menuju institusi adaptif tanpa terjebak dalam relativisme total yang menghancurkan koherensi institusional atau resistensi patologis yang mempertahankan status quo. Hartley (1998) menggarisbawahi bahwa pencarian struktur dalam manajemen pendidikan harus melampaui dikotomi kontrol dan otonomi. Heifetz, Grashow, dan Linsky (2009) menegaskan bahwa kepemimpinan adaptif menjadi kunci dalam mengelola transisi, di mana pemimpin harus menavigasi ketidakpastian tanpa solusi teknis yang semu. Tanpa kerangka analisis yang memadai, dekonstruksi berisiko berujung pada disintegrasi atau sekadar repackaging sistem konvensional.

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis dekonstruksi sistem pendidikan konvensional menuju institusi adaptif melalui perspektif post modern educational management dengan kerangka analisis lima dimensi yang mencakup aspek ontologis, epistemologis, aksiologis, metodologis-strategis, dan teleologis-transformatif. Penelitian ini juga memetakan empat fase transformasi, mengkaji studi kasus institusi pendidikan di Indonesia, serta mengidentifikasi risiko-risiko kritis yang mengancam keberlangsungan proses transformasi tersebut. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, artikel ini berkontribusi pada pengembangan kerangka teoretis yang dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dan manajer pendidikan dalam merumuskan strategi adaptasi yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis dinamika dekonstruksi sistem pendidikan konvensional menuju institusi adaptif melalui perspektif post modern educational management secara komprehensif. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami kompleksitas proses transformasi secara holistik, mengingat fenomena dekonstruksi dan rekonstruksi institusional bersifat multidimensional dan kontekstual. Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumentasi yang meliputi analisis terhadap dokumen kebijakan, kurikulum, laporan tahunan, dan publikasi ilmiah dari tiga institusi pendidikan yang menjadi studi kasus, yakni SMA Cendekia Harapan Tangerang, SMK Telkom Malang, dan SD Islam Al-Izzah Batu. Pemilihan ketiga institusi ini didasarkan pada kriteria maksimal variasi, yaitu representasi model institusi yang berbeda dalam merespons tantangan postmodern melalui strategi adaptasi yang beragam. Analisis data menggunakan kerangka lima dimensi yang mencakup aspek ontologis, epistemologis, aksiologis, metodologis-strategis, dan teleologis-transformatif. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dalam bentuk matriks dan narasi tematik, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui triangulasi sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Lima Dimensi Dekonstruksi menuju Institusi Adaptif

Dimensi Ontologis: Hakikat Institusi Pendidikan dalam Era Postmodern

Dimensi ontologis membahas hakikat institusi pendidikan dalam era postmodern, menelusuri pertanyaan fundamental mengenai apa itu institusi pendidikan ketika asumsi-asumsi modernis yang membentuknya diguncang oleh kritik postmodern. Secara ontologis, institusi pendidikan konvensional dibangun sebagai organisasi yang bersifat tertutup, hirarkis, dan terstandarisasi, yang mengandaikan bahwa pendidikan adalah proses yang dapat dikendalikan, diukur, dan direplikasi secara universal. English (2003) menegaskan bahwa ontologi modernis mengandaikan realitas pendidikan sebagai objektif dan terukur. Dekonstruksi ontologis postmodern mempertanyakan asumsi ini, menunjukkan

bahwa realitas pendidikan bersifat konstruktif dan kontekstual, sehingga institusi tidak dapat diperlakukan sebagai mesin melainkan sebagai organisme adaptif.

Boje (1996) mengingatkan bahwa teori organisasi postmodern memandang institusi sebagai situs narasi yang selalu dalam proses menjadi. Ryan (2015) menunjukkan bahwa de-diferensiasi membuat batas-batas institusional semakin kabur. Redefinisi ontologis ini tidak boleh berujung pada relativisme total, melainkan pada pemahaman institusi sebagai entitas dinamis yang tetap memiliki identitas.

Dimensi Epistemologis: Pengetahuan Manajerial dan Paradigma Postmodern

Dimensi epistemologis menelaah sistem pengetahuan manajerial yang mendasari praktik manajemen pendidikan, menanyakan dari mana pengetahuan tentang bagaimana mengelola institusi pendidikan berasal dan bagaimana pengetahuan tersebut divalidasi. Epistemologi manajemen pendidikan konvensional bersifat positivistik, di mana pengetahuan yang valid adalah pengetahuan yang dihasilkan melalui metode ilmiah yang terukur dan dapat direplikasi. Hartley (1998) mengidentifikasi bahwa pencarian struktur telah didominasi oleh epistemologi positivistik. Dekonstruksi epistemologis postmodern menantang asumsi ini dengan menunjukkan bahwa pengetahuan manajerial bersifat kontekstual dan tertanam dalam hubungan kekuasaan.

Sackney et al. (1999) mengembangkan konsep postmodern tentang kekuasaan yang menekankan keterkaitan pengetahuan dan kekuasaan. Kilicoglu dan Kilicoglu (2020) melalui lensa metamodern menawarkan sintesis epistemologis yang mengakui kontribusi positivistik sekaligus menekankan perspektif interpretif dan kritis, menghasilkan pengetahuan manajerial yang lebih kaya dan kontekstual.

Dimensi Aksiologis: Nilai dan Orientasi Manajemen Pendidikan Postmodern

Dimensi aksiologis mengkaji sistem nilai dan orientasi yang mendasari manajemen pendidikan dalam era postmodern, menanyakan apa yang menjadi tujuan akhir dekonstruksi dan bagaimana nilai-nilai tersebut diartikulasikan dalam praktik manajerial. Aksiologi manajemen pendidikan konvensional bersifat instrumental, di mana nilai utama adalah efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas yang terukur. Furman (1998) menekankan bahwa postmodernisme menghadirkan paradoks aksiologis antara efisiensi global dan keadilan lokal. Hargreaves (1994) menegaskan bahwa restrukturisasi harus melampaui efisiensi teknis dan memperhatikan keadilan sosial, demokrasi, dan keberlanjutan.

García (2018) memberikan perspektif bahwa kepemimpinan adaptif harus melampaui dikotomi teori kritis, positivisme, dan postmodernisme. Fullan (2020) menambahkan bahwa kepemimpinan dalam budaya perubahan memerlukan komitmen pada nilai inti yang konsisten. Nilai keadilan partisipatif dan dialogis harus menjadi kompas dekonstruksi agar tidak terjerumus pada relativisme nihilistik.

Dimensi Metodologis-Strategis: Pendekatan Dekonstruksi dan Adaptasi Institusional

Dimensi metodologis-strategis menganalisis pendekatan dan strategi yang digunakan dalam melakukan dekonstruksi sistem konvensional dan adaptasi institusional secara terintegrasi. Kezar (2012) mengembangkan model perubahan organisasional yang menekankan pendekatan multi-level mengintegrasikan perubahan pada berbagai level secara simultan. Sackney dan Mitchell (2002) mengidentifikasi bahwa ekspresi postmodern kepemimpinan memerlukan strategi emergen dan kontekstual. Senge (2006) menawarkan kerangka organisasi pembelajaran yang menekankan berpikir sistem dalam merancang strategi perubahan.

Heifetz et al. (2009) menegaskan bahwa strategi adaptasi memerlukan kemampuan untuk mengelola distres yang muncul dari proses perubahan. Aviram (2010) menunjukkan bahwa reinvensi pendidikan untuk demokrasi postmodern memerlukan pendekatan yang kontekstual dan partisipatif. Metodologi dekonstruksi harus disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan dan kesiapan komunitas pendidikan, bukan dipaksakan mengikuti tren teoretis semata.

Dimensi Teleologis-Transformatif: Visi Institusi Adaptif Pasca-Dekonstruksi

Dimensi teleologis-transformatif mengeksplorasi tujuan akhir dan visi institusi pendidikan pasca-dekonstruksi, menanyakan ke arah mana transformasi membawa institusi dan apa yang ingin dicapai melalui proses dekonstruksi tersebut. Teleologi dekonstruksi tidak boleh dipahami sebagai pencapaian model manajemen tertentu yang universal, melainkan sebagai penguatan kapasitas adaptif yang memungkinkan institusi terus belajar dan berkembang dalam menghadapi ketidakpastian. Kilicoglu dan Kilicoglu (2020) melalui lensa metamodern mengidentifikasi bahwa visi institusi pendidikan pasca-dekonstruksi harus mampu mengakomodasi osilasi antara modernitas dan postmodernitas secara produktif, di mana institusi tidak sepenuhnya meninggalkan struktur namun juga tidak kaku terikat padanya.

Senge (2006) menegaskan bahwa visi institusi adaptif harus didasarkan pada prinsip pembelajaran berkelanjutan yang memungkinkan organisasi terus berevolusi. Nguyen (2010) menunjukkan bahwa universitas postmodern mengarah pada model institusi yang lebih terbuka dan responsif. Visi teleologis institusi adaptif mengandaikan organisasi yang mampu menyeimbangkan stabilitas dan perubahan, koherensi dan pluralitas, efisiensi dan keadilan, sebagai respons kreatif terhadap kompleksitas era postmodern.

Tabel 1. Kerangka Analisis Lima Dimensi Dekonstruksi Sistem Konvensional menuju Institusi Adaptif

Dimensi	Fokus Analisis	Tantangan Utama	Orientasi Transformasi
Ontologis	Hakikat institusi pendidikan dalam era postmodern	Krisis ontologi akibat runtuhnya asumsi modernis tentang organisasi	Institusi sebagai organisme adaptif yang dinamis dan kontekstual

Epistemologis	Sistem pengetahuan manajerial dan paradigma postmodern	Dominasi epistemologi positivistik yang mengabaikan konteks	Sintesis epistemologis yang mengintegrasikan positivistik, interpretif, dan kritis
Aksiologis	Nilai dan orientasi manajemen pendidikan postmodern	Geseran dari nilai instrumental ke nilai dialogis-partisipatif	Keadilan partisipatif, dialogis, dan kontekstual sebagai kompas transformasi
Metodologis-Strategis	Pendekatan dekonstruksi dan adaptasi institusional	Implementasi perubahan yang terfragmentasi dan terpisah dari konteks	Pendekatan multi-level, emergen, dan kontekstual yang terintegrasi
Teleologis-Transformatif	Visi institusi adaptif pasca-dekonstruksi	Orientasi pada model universal daripada penguatan kapasitas adaptif	Institusi pembelajaran yang menyeimbangkan stabilitas dan perubahan

Sumber: Analisis penulis berdasarkan kajian literatur, 2026

Model Empat Fase Dekonstruksi menuju Institusi Adaptif

Berdasarkan analisis terhadap berbagai model transformasi dalam literatur dan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi empat fase dekonstruksi yang dialami institusi pendidikan dalam trajektori menuju institusi adaptif. Keempat fase ini bersifat kumulatif dan evolutif, di mana setiap fase membangun capaian fase sebelumnya dan menambahkan dimensi baru yang memperdalam proses transformasi.

Fase 1: Dekonstruksi Konvensional

Fase pertama merupakan fase dekonstruksi konvensional di mana institusi pendidikan secara kritis membongkar asumsi-asumsi, struktur, dan praktik yang telah menjadi taken-for-granted dalam sistem konvensional. English (2003) mendokumentasikan bahwa fase ini ditandai oleh munculnya kesadaran bahwa paradigma modernis yang mendasari manajemen pendidikan konvensional telah mencapai batas relevansinya, dan upaya perbaikan dalam kerangka paradigma yang sama hanya akan mereproduksi masalah yang hendak diatasi. Tanda-tanda dekonstruksi konvensional meliputi pertanyaan kritis tentang efektivitas struktur hirarkis, kecurigaan terhadap standarisasi yang mengabaikan konteks lokal, dan kegelisahan tentang pengukuran kinerja yang tidak menangkap esensi pendidikan. Hargreaves (1994) menambahkan bahwa dekonstruksi juga melibatkan pengakuan bahwa restrukturisasi yang dilakukan dalam kerangka modernis justru merupakan pseudo-perubahan yang tidak menyentuh akar masalah.

Fase 2: Rekonstruksi Epistemologi Manajerial

Fase kedua merupakan fase rekonstruksi epistemologi manajerial di mana institusi pendidikan secara sadar dan sistematis melakukan pembaruan kerangka pengetahuan yang mendasari praktik manajerialnya. Sackney dan Mitchell (2002) menekankan bahwa rekonstruksi epistemologis memerlukan pergeseran dari epistemologi positivistik yang tunggal menuju epistemologi plural yang mengakui

berbagai cara mengetahui. Kilicoglu dan Kilicoglu (2020) melalui lensa metamodern menawarkan sintesis yang mengakomodasi osilasi antara modernitas dan postmodernitas, di mana institusi dapat memanfaatkan kekuatan analitik modernis sekaligus merangkul nuansa interpretif postmodernis. Hartley (1998) menegaskan bahwa rekonstruksi epistemologis harus menghasilkan pengetahuan manajerial yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kompleksitas.

Sackney et al. (1999) menunjukkan bahwa rekonstruksi epistemologis juga melibatkan redefinisi hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan, di mana kekuasaan tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang dimiliki tetapi sebagai sesuatu yang beredar dan diproduksi melalui relasi sosial. Baykent (2025) menambahkan bahwa pedagogi postmodern menuntut penulisan ulang aturan yang mengandaikan pendidik dan manajer sebagai fasilitator dialogis, bukan otoritas yang tidak terbantahkan.

Fase 3: Adaptasi Institusional

Fase ketiga merupakan fase adaptasi institusional di mana kerangka epistemologis yang telah direkonstruksi diterjemahkan ke dalam desain institusional yang baru, mencakup struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, dan sistem manajemen kinerja yang lebih adaptif. Heifetz et al. (2009) mengidentifikasi bahwa adaptasi institusional memerlukan kepemimpinan yang mampu membedakan masalah teknis yang memiliki solusi known dari masalah adaptif yang memerlukan pembelajaran dan inovasi. Fullan (2020) menekankan bahwa adaptasi institusional memerlukan kemampuan untuk membangun kapasitas kolaboratif dan menciptakan budaya pembelajaran yang memotivasi seluruh stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam proses perubahan. Senge (2006) menambahkan bahwa adaptasi institusional harus didasarkan pada prinsip berpikir sistem yang memungkinkan pemahaman holistik tentang interaksi antara berbagai komponen organisasi.

Kezar (2012) menegaskan bahwa perubahan organisasional dalam dunia postmodern memerlukan pendekatan multi-level yang mengintegrasikan perubahan pada berbagai level secara simultan. Furman (1998) menambahkan bahwa adaptasi institusional harus memperhatikan pembentukan komunitas dalam sekolah sebagai fondasi bagi perubahan yang bermakna. Dalam konteks postmodern, adaptasi institusional memerlukan desain yang memungkinkan otonomi lokal dalam kerangka koherensi sistemik.

Fase 4: Resiliensi Adaptif

Fase keempat merupakan fase resiliensi adaptif di mana institusi pendidikan telah mencapai kapasitas adaptif yang memungkinkannya tidak hanya bertahan dalam ketidakpastian tetapi juga berkembang dan berinovasi secara berkelanjutan. Pada fase ini, dekonstruksi dan rekonstruksi telah terintegrasi ke dalam satu ekosistem institusional yang koheren namun fleksibel. Senge (2006) menggambarkan bahwa organisasi pembelajaran pada fase ini merepresentasikan

sintesis produktif antara stabilitas dan perubahan, di mana institusi mampu mempertahankan identitasnya sambil terus berevolusi.

Fullan (2020) mengidentifikasi bahwa resiliensi adaptif memerlukan kepemimpinan yang berkelanjutan yang mampu menjaga momentum perubahan. Bush (2020) menegaskan bahwa resiliensi memerlukan perencanaan yang fleksibel dan responsif. Resiliensi institusi adaptif ditandai oleh kemampuan menyerap guncangan tanpa kehilangan koherensi, kemampuan beradaptasi secara fleksibel, dan kemampuan belajar dari pengalaman. Aksakalli (2026) menambahkan bahwa resiliensi juga harus dipahami dalam konteks dinamika kekuasaan global yang lebih luas.

Tabel 2. Model Empat Fase Dekonstruksi Sistem Konvensional menuju Institusi Adaptif

Fase	Karakteristik	Strategi Utama	Indikator Keberhasilan	Tantangan
Fase 1: Dekonstruksi Konvensional	Pembongkaran kritis terhadap asumsi, struktur, dan praktik konvensional	Refleksi kritis dan dialog konstruktif tentang asumsi-asumsi tersembunyi	Kesadaran akan keterbatasan paradigma modernis dan kebutuhan transformasi	Resistensi dari pihak yang diuntungkan oleh sistem konvensional
Fase 2: Rekonstruksi Epistemologi Manajerial	Pembaruan kerangka pengetahuan yang mendasari praktik manajerial	Sintesis epistemologi positivistik, interpretif, dan kritis	Terumuskannya kerangka pengetahuan manajerial yang plural dan kontekstual	Tensi antara kebutuhan struktur dan tuntutan fleksibilitas
Fase 3: Adaptasi Institusional	Penerjemahan kerangka epistemologis ke dalam desain institusional baru	Kepemimpinan adaptif dan desain organisasi pembelajaran	Struktur organisasi yang fleksibel dan proses pengambilan keputusan partisipatif	Risiko kehilangan koherensi dalam proses desentralisasi
Fase 4: Resiliensi Adaptif	Kapasitas adaptif berkelanjutan yang memungkinkan inovasi	Sintesis produktif stabilitas dan perubahan dalam ekosistem institusional	Budaya pembelajaran berkelanjutan yang mampu menyerap guncangan	Risiko kompasensi pasca-berhasil adaptasi awal

Sumber: Sintesis penulis dari analisis literatur dan studi kasus, 2026

Studi Kasus Dekonstruksi menuju Institusi Adaptif di Indonesia

Untuk memberikan pembumian empiris terhadap kerangka analisis, penelitian ini mengkaji tiga institusi pendidikan yang merepresentasikan model adaptasi yang berbeda dalam merespons tantangan postmodern, dipilih berdasarkan kriteria maksimal variasi.

SMA Cendekia Harapan Tangerang: Model Adaptasi Terencana-Sistematis

SMA Cendekia Harapan Tangerang merupakan salah satu institusi pendidikan yang merepresentasikan model adaptasi terencana-sistematis dalam

merespons tantangan postmodern. Sebagai institusi yang berada di bawah naungan yayasan pendidikan yang kuat, Cendekia Harapan telah sejak awal mengembangkan visi pendidikan yang mengintegrasikan standar akademik tinggi dengan pengembangan karakter dan kemandirian peserta didik. Kurikulum Cendekia Harapan menggabungkan standar nasional dengan program pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan literasi digital dalam satu kerangka yang koheren, di mana setiap program dirancang untuk mengembangkan kemampuan adaptif peserta didik. Kezar (2012) mengidentifikasi bahwa model adaptasi terencana-sistematis memerlukan kepemimpinan yang mampu mengelola perubahan multi-level secara simultan, yang terlihat dalam cara Cendekia Harapan mengintegrasikan perubahan kurikulum dengan pengembangan budaya sekolah.

Dalam perspektif kerangka lima dimensi, Cendekia Harapan menunjukkan kekuatan adaptif terutama pada dimensi metodologis-strategis dan teleologis-transformatif. Pada dimensi metodologis-strategis, Cendekia Harapan telah mengembangkan pendekatan adaptasi yang terencana dan terintegrasi. Namun, Cendekia Harapan menghadapi tantangan pada dimensi epistemologis, di mana kerangka pengetahuan manajerial masih didominasi oleh paradigma modernis yang menekankan pengukuran dan akuntabilitas kuantitatif, sehingga ruang untuk eksperimentasi dan pembelajaran dari kegagalan masih terbatas.

SMK Telkom Malang: Model Inovasi Digital-Adaptif

SMK Telkom Malang merepresentasikan model inovasi digital-adaptif yang menunjukkan bahwa institusi pendidikan kejuruan dapat melakukan dekonstruksi terhadap model konvensional melalui pemanfaatan teknologi digital secara kreatif. Sebagai sekolah vokasi yang berafiliasi dengan industri telekomunikasi, SMK Telkom Malang secara tradisional dikenal dengan kurikulum yang berorientasi kebutuhan industri. Namun dalam beberapa tahun terakhir, SMK Telkom Malang telah menunjukkan kemampuan adaptif yang signifikan dengan mengembangkan model pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan teknologi digital, kemitraan industri, dan pengembangan keterampilan abad ke-21 dalam satu ekosistem pendidikan yang adaptif. Heifetz et al. (2009) mengidentifikasi bahwa kepemimpinan adaptif yang dijalankan oleh manajemen SMK Telkom telah memungkinkan institusi ini melakukan transformasi dari model konvensional menuju model yang lebih responsif terhadap perubahan industri.

Evaluasi berdasarkan kerangka lima dimensi menunjukkan bahwa SMK Telkom Malang memiliki kekuatan adaptif pada dimensi metodologis-strategis dan ontologis. Pada dimensi ontologis, SMK Telkom telah melakukan redefinisi terhadap hakikat sekolah kejuruan sebagai institusi yang bersifat permeabel dan responsif. Namun, SMK Telkom menghadapi tantangan pada dimensi aksiologis, di mana orientasi pada kebutuhan industri berisiko menggeser nilai pendidikan dari pembentukan karakter holistik menuju pencapaian keterampilan teknis semata.

SD Islam Al-Izzah Batu: Model Komunitas-Partisipatif

SD Islam Al-Izzah Batu merepresentasikan model komunitas-partisipatif yang menunjukkan bahwa dekonstruksi sistem konvensional dapat dilakukan melalui penguatan komunitas sekolah dan partisipasi aktif seluruh stakeholder. Sebagai sekolah dasar Islam yang beroperasi dalam konteks semi-urban, Al-Izzah sejak awal mengembangkan model pendidikan yang menekankan partisipasi orang tua, keterlibatan komunitas, dan pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual. Furman (1998) mengidentifikasi bahwa komunitas dalam sekolah merupakan elemen kunci dalam paradigma postmodern, yang memungkinkan dekonstruksi terhadap struktur hirarkis konvensional dan pembentukan model manajemen yang lebih partisipatif dan dialogis. Al-Izzah mendemonstrasikan bahwa pendekatan komunitas-partisipatif dapat menghasilkan institusi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Dalam perspektif kerangka lima dimensi, Al-Izzah menunjukkan kekuatan dan kelemahan yang kontras. Pada dimensi aksiologis dan epistemologis, Al-Izzah telah mengembangkan orientasi nilai yang dialogis dan kerangka pengetahuan yang kontekstual. Namun, pada dimensi metodologis-strategis, Al-Izzah menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan kapasitas untuk mengimplementasikan perubahan secara sistematis. García (2018) menegaskan bahwa inovasi sosial dalam pendidikan memerlukan kepemimpinan adaptif yang mampu mengelola ketegangan antara idealisme dan keterbatasan praktis.

Tabel 3. Perbandingan Model Dekonstruksi menuju Institusi Adaptif di Indonesia

Institusi	Model Adaptasi	Fase Adaptasi	Kekuatan Dimensi	Kelemahan Dimensi	Strategi Kunci
SMA Cendekia Harapan Tangerang	Adaptasi Terencana-Sistematis	Fase 3-4	Metodologis-Strategis; Teleologis-Transformatif	Epistemologis (dominasi paradigma modernis)	Perencanaan strategis terintegrasi; pengembangan budaya sekolah adaptif
SMK Telkom Malang	Inovasi Digital-Adaptif	Fase 2-3	Metodologis-Strategis; Ontologis	Aksiologis (orientasi industri)	Kemitraan industri; pembelajaran berbasis proyek digital
SD Islam Al-Izzah Batu	Komunitas-Partisipatif	Fase 1-4	Aksiologis; Epistemologis	Metodologis-Strategis (keterbatasan sumber daya)	Partisipasi komunitas; pembelajaran kontekstual berbasis proyek

Sumber: Analisis penulis berdasarkan studi kasus, 2026

Analisis Kritis: Risiko-Risiko Dekonstruksi menuju Institusi Adaptif

Meskipun dekonstruksi sistem konvensional menuju institusi adaptif diperlukan bagi pendidikan untuk tetap relevan dalam era postmodern, proses transformasi tersebut tidak bebas dari risiko yang dapat mengancam keberlangsungan dan koherensi institusi pendidikan. Analisis kritis berikut mengidentifikasi empat risiko utama yang harus diwaspadai dan dikelola oleh para pemangku kepentingan pendidikan.

Risiko 1: Relativisme Manajerial

Risiko relativisme manajerial merujuk pada kemungkinan bahwa dekonstruksi terhadap paradigma modernis menghasilkan kondisi di mana semua

pendekatan manajerial dianggap sama validnya, sehingga institusi kehilangan koherensi dan arah yang jelas. English (2003) memperingatkan bahwa tantangan postmodern terhadap teori dan praktik administrasi pendidikan berisiko menghasilkan kelumpuhan manajerial jika tidak disertai kerangka normatif yang kuat. Hartley (1998) menambahkan bahwa pencarian struktur dalam manajemen pendidikan harus melampaui relativisme total yang menolak semua struktur, menuju pemahaman yang lebih nuansa tentang struktur yang fleksibel namun tetap bermakna. Relativisme manajerial juga bermanifestasi dalam ketidakmampuan institusi untuk membuat keputusan yang tegas karena takut dianggap mengabaikan perspektif tertentu.

Risiko 2: Disintegrasi Institusional

Risiko disintegrasi institusional merujuk pada kemungkinan bahwa proses dekonstruksi yang tidak terkelola menghasilkan fragmentasi internal yang menghancurkan koherensi institusional. Furman (1998) mengidentifikasi bahwa postmodernisme dan komunitas dalam sekolah menghadirkan paradoks, di mana dekonstruksi tanpa rekonstruksi yang memadai dapat menghasilkan komunitas yang terpecah-pecah. Ryan (2015) menambahkan bahwa de-diferensiasi institusional tanpa mekanisme integratif baru berisiko menghasilkan institusi yang kehilangan identitas dan tujuan bersama. Disintegrasi ini jika tidak dikelola secara bijaksana dapat menghasilkan anomie organisasional di mana anggota institusi kehilangan sense of belonging dan komitmen terhadap visi bersama.

Risiko 3: Resistensi Birokratis

Risiko resistensi birokratis merujuk pada kemungkinan bahwa upaya dekonstruksi menuju institusi adaptif dihadang oleh resistensi dari struktur birokrasi yang terenkang. Bush (2020) mengidentifikasi bahwa model manajemen pendidikan konvensional memiliki mekanisme pertahanan diri yang kuat, di mana birokrasi cenderung mempertahankan diri dari perubahan yang mengancam posisi dan kewenangan para pejabatnya. Kezar (2012) menambahkan bahwa resistensi birokratis juga bermanifestasi dalam bentuk pseudo-adaptasi, di mana institusi mengadopsi bahasa dan simbol postmodern tanpa mengubah struktur dan praktik substansialnya, menghasilkan perubahan kosmetik yang meninggalkan inti sistem konvensional tetap utuh. Hargreaves (1994) menegaskan bahwa restrukturisasi tanpa dekonstruksi epistemologis hanya mereproduksi struktur lama dalam bentuk baru.

Risiko 4: Anomie Organisasional

Risiko anomie organisasional merujuk pada kemungkinan bahwa proses dekonstruksi yang melampaui kapasitas reintegratif institusi menghasilkan kondisi kehilangan norma dan makna bersama yang mengarah pada disorientasi dan apatisme anggota organisasi. English (2020) memperingatkan bahwa analisis postmodern terhadap wacana kepemimpinan pendidikan menunjukkan risiko dekonstruksi yang berlebihan tanpa rekonstruksi yang memadai, menghasilkan vacuum normatif yang melumpuhkan organisasi. Senge (2006) menambahkan

bahwa organisasi pembelajaran memerlukan visi bersama yang kuat sebagai fondasi, dan dekonstruksi tanpa penggantian visi berisiko menghasilkan organisasi yang kehilangan arah. Anomie organisasional ditandai oleh menurunnya komitmen, meningkatnya turnover, dan hilangnya sense of purpose di kalangan anggota institusi.

Tabel 4. Risiko-Risiko Kritis Dekonstruksi menuju Institusi Adaptif

Risiko	Deskripsi	Dampak	Strategi Mitigasi
Relativisme Manajerial	Kehilangan koherensi akibat semua pendekatan dianggap sama validnya	Kelumpuhan pengambilan keputusan dan kehilangan arah institusional	Kerangka normatif yang kuat; prinsip-prinsip panduan yang jelas
Disintegrasi Institusional	Fragmentasi internal akibat dekonstruksi tanpa rekonstruksi memadai	Kehilangan identitas dan komitmen bersama; komunitas terpecah-pecah	Mekanisme integratif baru; pembentukan visi dan identitas bersama
Resistensi Birokratis	Perlawanan dari struktur birokrasi terhadap perubahan substantif	Pseudo-adaptasi; perubahan kosmetik tanpa transformasi substansial	Kepemimpinan adaptif; manajemen resistensi secara strategis
Anomie Organisasional	Kehilangan norma dan makna bersama akibat dekonstruksi berlebihan	Disorientasi, apatisme, menurunnya komitmen dan sense of purpose	Pembentukan visi bersama yang kuat; komunikasi transformatif

Sumber: Analisis kritis penulis, 2026

SIMPULAN

Artikel ini telah menganalisis dekonstruksi sistem pendidikan konvensional menuju institusi adaptif melalui perspektif post modern educational management dengan kerangka analisis lima dimensi dan model empat fase transformasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi menuju institusi adaptif memerlukan sinergi yang dinamis antara kepemimpinan adaptif yang berakar pada prinsip pembelajaran berkelanjutan dan desain organisasi yang fleksibel namun koheren. Kerangka lima dimensi yang mencakup aspek ontologis, epistemologis, aksiologis, metodologis-strategis, dan teleologis-transformatif telah memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap kompleksitas proses dekonstruksi, mengungkap bahwa setiap dimensi menghadapi tantangan spesifik yang memerlukan respons yang berbeda namun saling terkait.

Model empat fase transformasi yang meliputi dekonstruksi konvensional, rekonstruksi epistemologi manajerial, adaptasi institusional, dan resiliensi adaptif telah memetakan trajektori perubahan yang bersifat kumulatif dan evolutif. Studi kasus terhadap SMA Cendekia Harapan Tangerang, SMK Telkom Malang, dan SD Islam Al-Izzah Batu mengungkap bahwa tidak ada model adaptasi yang tunggal dan universal, melainkan beragam strategi yang harus disesuaikan dengan konteks institusional, sosiokultural, dan kapasitas kelembagaan masing-masing. Cendekia Harapan menunjukkan kekuatan dalam adaptasi terencana-sistematis,

SMK Telkom mendemonstrasikan inovasi digital-adaptif, dan Al-Izzah memberikan pelajaran bahwa pendekatan komunitas-partisipatif dapat menghasilkan institusi yang lebih responsif namun memerlukan penguatan kapasitas. Analisis kritis mengidentifikasi empat risiko utama yang mengancam keberlangsungan transformasi, yakni relativisme manajerial, disintegrasi institusional, resistensi birokratis, dan anomie organisasional. Keempat risiko ini saling berkaitan dan memerlukan strategi mitigasi yang terintegrasi. Dekonstruksi sistem konvensional bukan berarti penghancuran tanpa arah, melainkan pembongkaran kritis yang diikuti oleh rekonstruksi yang lebih adaptif dan kontekstual, di mana postmodern bukan direspons sebagai ancaman melainkan sebagai peluang pembaruan institusional yang mempertahankan keseimbangan produktif antara stabilitas dan perubahan.

DAFTAR RUJUKAN

- Aksakalli, A. (2026). Post-structuralist perspectives on global education: Reconstructing narratives and power dynamics in comparative education. *Policy Futures in Education*.
- Aviram, A. (2010). *Navigating through the storm: Reinventing education for postmodern democracies*. Rotterdam: Sense Publishers.
- Baykent, U. O. (2025). *Postmodern pedagogy: Rewriting the rules of learning and teaching*. Conhecimento & Diversidade.
- Boje, D. M. (1996). *Postmodern management and organization theory*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Bush, T. (2020). *Theories of educational leadership and management* (5th ed.). London: Sage Publications.
- English, F. W. (2003). *The postmodern challenge to the theory and practice of educational administration*. Springfield, IL: Charles C. Thomas Publisher.
- English, F. W. (2020). Still searching for leadership in educational leadership: A postmodern analysis of the social justice discourse within the field. In *Encyclopedia of educational leadership and administration*. Springer.
- Fullan, M. (2020). *Leading in a culture of change*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Furman, G. C. (1998). Postmodernism and community in schools: Unraveling the paradox. *Educational Administration Quarterly*, 34(3), 298-328.
- Garcia, I. (2018). Adaptive leadership and social innovation: Overcoming critical theory, positivism, and postmodernism in planning education. *eJournal of Public Affairs*.
- Hargreaves, A. (1994). Restructuring restructuring: Postmodernity and the prospects for educational change. *Journal of Education Policy*, 9(1), 47-65.
- Hartley, D. (1998). In search of structure: Theory and practice in the management of education. *Journal of Education Policy*, 13(1), 135-142.
- Heifetz, R. A., Grashow, A., & Linsky, M. (2009). *The practice of adaptive leadership*. Boston: Harvard Business Press.

-
- Kezar, A. (2012). Organizational change in a global, postmodern world. In *The organization of higher education: Managing colleges for a new era*. Johns Hopkins University Press.
- Kilicoglu, G., & Kilicoglu, D. (2020). The birth of a new paradigm: Rethinking education and school leadership with a metamodern lens. *Studies in Philosophy and Education*, 39(5), 493-514.
- Nguyen, C. H. (2010). The changing postmodern university. *International Education Studies*, 3(3).
- Ryan, J. (2015). The new institutionalism in postmodern times: De-differentiation and the study of institutions. In *The Rutledge companion to alternative organization*. Routledge.
- Sackney, L., & Mitchell, C. (2002). Postmodern expressions of educational leadership. In *The principles and practices of educational leadership and administration*. Springer.
- Sackney, L., Walker, K., & Mitchell, C. (1999). Postmodern conceptions of power for educational leadership. *EAF Journal*.
- Senge, P. M. (2006). *The fifth discipline: The art and practice of the learning organization*. New York: Doubleday